|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Harian  | : | Metro Sulawesi | KasubaudSulteng II |
| Hari, tanggal | : | Jum’at, 3 Juli 2015 |
| Keterangan | : | **DPRD Poso Pangkas Anggaran Kampanye** |
| Entitas | : | Poso |

**Poso, Metrosulawesi.com -** Pembahasan revisi anggaran pilkada antara KPU Poso dan DPRD yang sebelumnya sempat tertunda akhirnya membuahkan hasil. Salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah perubahan pembiayaan alat peraga kampanye (APK).

Ketua Divisi Logistik KPU Poso, Iwan Ahmad mengatakan pembahasan sempat tertunda disebabkan KPU Poso harus melakukan penyesuaian beberapa jenis anggaran dan perbaikan dokumen.

“Item anggaran yang disepakati untuk diubah adalah pembiayaan alat peraga kampanye (APK) yang diajukan KPU tadinya sekitar  Rp5 Miliar menjadi hanya sekitar Rp2 Miliar saja,” katanya belum lama ini.

Iwan menjelaskan perubahan anggaran tidak hanya terjadi pada pembiayaan APK, namun perubahan anggaran juga terjadi pada item belanja modal.

“Sekarang tinggal dilakukan penyesuaian dengan aturan yakni Perbup dan Permendagri 51 tentang pedoman penyusunan anggaran pilkada," katanya.

Sementara Itu, Ketua Komisi III DPRD Poso, Iskandar Lamuka mengatakan bahwa proses penyesuaian anggaran dengan Permendagri 51 dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Karenanya dia mengatakan pembahasan bersama KPU membutuhkan waktu sekitar 3 hari lagi untuk melihat keseluruhan anggaran yang diajukan.

"Kita masih lakukan verifikasi, insha allah tiga hari kedepan sudah final, termasuk juga anggaran panwas," tutur Iskandar.

Lanjutnya, ada perubahan jumlah besaran anggaran pilkada dari semula yang diajukan oleh KPU berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp19,1 miliar.

“Sebelumnya KPU hanya mengajukan sebesar Rp13,4 miliar. Terjadinya perubahan jumlah itu dikarenakan adanya aturan bahwa KPU membiayai alat peraga kampanye kandidat, sehingga kemudian mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp5 miliar,” katanya.

Lebih jauh Iskandar mengatakan bahwa setelah melalui tahapan verifikasi dan penyesuaian kemungkinan anggaran pilkada akan berkurang.

“Setelah melalui tahapan verifikasi dan penyesuaian di beberapa item, kemungkinan jumlah anggaran pelaksanaan pilkada sekitar 17 miliar atau berkurang 2 miliar dibandingkan anggaran yang diajukan oleh KPU sebelumnya,” katanya.